

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Badan Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 dalam Harahap (2016:2), akuntansi adalah:

“... suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan.”

Menurut Rapph Estes dalam Kamaruddin Ahmad (2015:6), akuntansi adalah:

“... aktivitas-aktivitas yang berkaitan menyediakan informasi kepada pemegang saham, kreditur dan pihak berwenang biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam suatu monete, untuk pengambilan keputusan perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat.”

Menurut Kieso, et al. (2016:2), pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Accounting consist of the three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interes users. A company identifies the ecomonic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of event, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement.”

Penjelasan di atas dapat diartikan akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa

ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan mengenai perekonomian.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:9), jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. Akuntansi Manajemen
Bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya
Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan
Bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Auditing
Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan

tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.

5. Akuntansi pajak
Bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi
Bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran
Bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi internasional
Bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik
Bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Menurut Rahman Pura (2013:5) definisi akuntansi pajak adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Setiawan (2012:8) pengertian akuntansi

perpajakan adalah:

“... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:8)

definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga akan mempermudah dalam menyusun SPT (surat pemberitahuan).

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.1.5 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 07

(2015:2) definisi laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan secara umum adalah

sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”
Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Sementara itu, menurut Irham Fahmi (2015:21) pengertian laporan

keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Soemarso dalam Suteja (2018:8) menjelaskan bahwa laporan

keuangan adalah:

“... laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.1.6 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf

12- 14 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai

berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.7 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 08

(2015:6), jenis-jenis laporan keuangan lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30)

adalah sebagai berikut:

4. “Laporan laba rugi (statement of income) dan/ atau laporan laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income) selama periode.

5. Laporan perusahaan ekuitas (statement of financial position) pada akhir periode.
6. Laporan posisi keuangan (statement of financial position) pada akhir periode.
7. Laporan arus kas (statement of cash flow) selama periode.
8. Catatan atas laporan keuangan (notes of financial statement), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
9. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

2.1.1.8 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat

karateristik laporan keuangan yaitu:

- a. **Dapat Dipahami**
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
- b. **Relevan**
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka ka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 1. **Materialitas**
Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih

merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal.

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
4. Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.9 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan

beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah:

“... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.”

Munawir (2010:30) dalam Azhar Rifai (2021), mengemukakan pengertian Aset (aktiva) sebagai sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Pengertian aset sebagai bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Total Aset adalah keseluruhan harta atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Setiap perusahaan memiliki total aset yang berbeda-beda dalam hal jumlah dan jenisnya. Sukmalana (2007:39) dalam Azhar Rifai (2021).

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang- piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barangbarang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/ prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari

pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasipihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periodeini melainkan pada periode berikutnya.

2. Aktiva Tetap

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (deferred charges) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan

yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (Diferred Revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/ jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

3. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019: 62), ekuitas adalah:

“... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan.”

Sedangkan menurut SAK Paragraf 65 (2007: 12), ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba awal periode (retained earning), penyajian saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi

relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan entitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. Ekuitas yang dimiliki sebuah entitas umumnya terdiri dari :

1. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang- hutangnya. Modal saham (Common Stock), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan (Wastam Wahyu Hidayat, 2018: 19-20)” Menurut Nudzunul Fiara Thausyah (2015) Total aktiva adalah jumlah keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang apabila dijumlahkan nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas (Margaretha, 2003:108). Menurut Sagara (2020), modal untuk pendirian perusahaan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

1. Modal Dasar

Modal dasar (statutair capital, nominal/authorized kapital) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUPT Tahun 2007, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni. Mengenai minimal modal dasar (authorized minimum), adalah jumlah yang paling rendah yang dibenarkan undang-undang dicantumkan dalam anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007, modal dasar Perseroan dibenarkan, paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

2. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. 9 Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.

3. Modal Disetor

Modal yang disetor (gestort kapital, paid-up capital) adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan juga harus disetorkan pada saat pendirian perseroan terbatas.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:20), Agio/ disagio

adalah:

“... keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:20), laba ditahan

(Retained Earning) adalah:

“... laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para

pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi).”

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38) laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38), komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) Paragraf 06 (2018:4),

penghasilan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Beban

Menurut PSAK 01 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian

Laporan Keuangan Paragraf 78 (2015), definisi beban:

“...mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan asset tetap.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. Penjualan Bersih (Net Sales)

Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.

2. Harga pokok Penjualan (Cost of Goods Sold)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - Bahan Baku (Raw Material)
 - Upah Langsung (Direct Labour)
 - Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (Gross profit)
Laba kotor (Gross profit) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (Operating Expenses)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (Selling Expenses), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (General and Administration Expenses), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (Operating Profit)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum pajak (Earning Before Tax)
Total laba bersih yang belum dipotong dengan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (Earning After Tax)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (Retained Earning)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

Pengertian Beban Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2010) dalam Muchammad Alfi Firdiansyah (2018) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Putri Hadiyanti Pratiwi (2023) Beban pajak penghasilan adalah pungutan yang dikenakan baik kepada orang maupun badan yang harus dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah. Metode penghitungan beban pajak diambil dari (Rahmi, 2013) dengan membagi antara beban pajak penghasilan dan total asset perusahaan untuk periode sebelumnya. Rasio yang digunakan dalam penetapan pajak dimaksudkan untuk menghindari bias yang diakibatkan oleh perbedaan nilai nominal antara masing-masing entitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

d. Laporan Arus Kas

Sukamulja (2019:40) “Laporan arus kas merupakan laporan yang mencerminkan aliran kas didalam perusahaan seperti arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada periode tertentu”.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 Tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi

yang sifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

2.1.1.10 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (accounting income). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/stakeholders, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (Bursa Efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK), yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi

 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal
 - b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan.

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: Rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (average) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi.

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the years digits method), metode saldo menurun (declining balance method) atau saldo menurun ganda (double declining balanced method), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal, memilih metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (straight line method) dan saldo menurun ganda (double declining balanced method) untuk harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Disamping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu asset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan. Demikian akuntansi komersial

memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang.
 Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industry tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha Energi dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 1. Pergantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 2. Penghasilan deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/bumda sebagai wajib pajak dalam negeri dalam persyaratan tertentu.
 3. Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 4. Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 5. Iuran dan penghasilan tertentu dapat diterima dana pensiun.
 6. Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 2. Penghasilan berupa hadiah undian.
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta merupakan tanah dan bangunan, usaha jasa dan konstruksi, usaha real estate dan

- persewaan tanah dan bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain- lain).
 6. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
1. Kerugian suatu usaha diluar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 2. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 3. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam pasal 9 ayat(1) UU PPh):
1. Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 2. Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan Energi.
 3. Pajak penghasilan.
 4. Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang- undangan perpajakan.
 5. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
 6. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya dan lain-lain.
- e. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan setara atau perbedaan waktu”.

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) dalam Rima Mayangsari (2018) bahwa signalling theory adalah cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, di mana informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan guna memberikan isyarat kepada pemegang saham atau investor mengenai manajemen perusahaan dalam melihat prospek perusahaan kedepannya sehingga dapat membedakan perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas buruk. Laporan perusahaan yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemegang saham dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Manajemen perusahaan dapat memberikan laporan perusahaan sebagai kepentingan internal. Minat investor dapat dipertahankan dengan cara memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemegang saham. Signalling theory menekankan pentingnya laporan perusahaan yang digunakan sebagai keputusan investasi (Moeljadi & Supriyati, 2014).

Teori sinyal menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan untuk memberikan sinyal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan berupa suatu informasi seperti laporan keuangan tahunan perusahaan terkait upaya manajemen dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan yang semaksimal mungkin. Sinyal juga dapat berupa informasi yang dapat dipercaya terkait suatu gambaran atau prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang baik akan

mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar terkait volume perdagangan saham (Sartono, 2010: 392).

Hubungan teori sinyal dengan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi signal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi signal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari investor. Dengan kata lain investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bernilai tidak baik (Kadek Sukma Ariyanti,2022).

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Konservatisme

Menurut Hanafi dan Halim (2009) dalam Ira Gustina (2018) Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidak pastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bias diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Menurut Juanda (2007) dalam Ira Gustina (2018) konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-

angka pendapatan dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya cenderung tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah (understatement). Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya.

Pengertian konservatisme berdasarkan glossary dalam FASB Statement of Concept No.2 dalam Sari (2004) dalam Enni Savitri (2016:20), adalah:

“... reaksi hati-hati (prudent reaction) menghadapi ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan.”

Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip penting dalam pelaporan keuangan dengan konsep mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Model pengukuran konservatisme yang dilakukan pada Penelitian ini menggunakan Accrual Measures dalam model penelitian Givoly dan Hayn (2000) dalam Hasina dan Sulastiningsih (2020).

2.1.3.2 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Menurut Enni Savitri (2016:25) PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin

dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang persediaan
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain
3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan

Berdasarkan metode dalam PSAK yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan konservatisme akuntansi di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan

penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.

3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

Dengan adanya pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut. Penerapan konsep ini juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang (Sari dan Adhariani, 2009).

2.1.3.2. Jenis-Jenis Konservatisme Akuntansi

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (Unconditional Conservatism), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk Penelitian Dan Pengembangan (RdanD). Beban RdanD dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan RdanD secara insentif akan selalu lebih rendah (understated).
2. Konservatisme Bersyarat (Conditional Conservatism), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PPdanE atau goodwill apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi aruskasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

2.1.3.3. Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Terdapat tipe-tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi menurut Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45):

“Tiga tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi, yaitu:

- a. Earning/stock return relation measures.
- b. Earning/Accrual measures.
- c. Net Asset Measures.”

Berdasarkan tiga tipe pengukuran konservatisme akuntansi di atas

maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Earning/Stock Return Relations Measures

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50) konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara return saham terhadap laba.

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_1 DR_{it} + e_{it}$$

Keterangan

EPS_{it} = Laba per lembar saham perusahaan i tahun t

P_{it} = Harga pasar pembukaan untuk perusahaan i tahun t

R_{it} = Return saham perusahaan i tahun t

DR_{it} = Variable dummy dengan nilai 1 jika $R_{it} < 0$ (proksi kabar buruk) dan 0 jika $R_{it} > 0$ (proksi kabar baik)

α_0 = Intersep

α_1 = Koefisien variabel dummy jenis periode

β_0 = Koefisien (slop) regresi

β_1 = Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode

ϵ_{it} = Error terms

Jika koefisien β_1 memiliki tanda positif dan secara signifikan berbeda dengan nol maka terjadi konservatisme laba pada perusahaan.

2. Earning/Accrual Measures

a. Model Givoly dan Hayn (2000)

Menurut Dwiputro (2009) dalam Enni Savitri (2016:55) menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan.

Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya

dari aktiva yang dimiliki perusahaan.

Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

Givoly dan Hayn merumuskan conservatism based on accrual items, sebagai berikut :

$$CONACC = \frac{(NIO + DEP - CFO) \times (-1)}{TA}$$

Keterangan :

CONACC = Tingkat Konservatisme

NIO = Net income (laba tahun berjalan)

DEP = Depreciation of fixed assets of current year
(Penyusutan aktiva tetap tahun berjalan)

CFOit = Net amount of cash flow from operating activities
of current year (Jumlah arus kas dari aktivitas
operasi tahun berjalan)

TA = Total Aset

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif.

Menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Hans Hananto Andreas

(2017) Jika nilai CONACC > 0 , artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi. Jika nilai CONACC < 0 , artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang rendah.

Menurut Kadek dan Dewa (2016) apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negatif, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi.

b. Model Zhang (2007)

Menurut Zhang (2007) dalam Enni Savitri (2016:56) menggunakan *conv_accrual* sebagai salah satu pengukuran konservatisme. *Conv_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya Zhang (2007) mengalikan *conv_accrual* dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi nilai *conv_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

Berikut perhitungan konservatisme akrual menurut Zhang dalam (Alfian, 2013). Dalam penelitiannya (Zhang, 2007) mengatakan non operating accrual konsisten dengan (Givoly dan Hayn, 2000).

$$\text{Conservatism accrual} = \frac{\text{Non operating accrual} \times (-1)}{\text{Total Asset}}$$

3. Net Asset Measures

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan market to book ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya Enni Savitri (2016:57).

Penggunaan net asset dapat dilihat dalam model Feltham-Ohlson yang mengukur besarnya undervaluation dari net asset dengan cara mencari nilai parameter yang mencerminkan tingkat understatement dari operating assets terkait dengan asumsi bahwa depresiasi secara akuntansi umumnya melebihi depresiasi secara ekonomis. Hal tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus fixed effect panel data regresi sebagai berikut :

$$BTM_{i,t} = a_t + a_i + \sum_{j=0}^6 \beta R_{t-j,i} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

BTM	= Book to market ratio perusahaan i pada akhir tahun t
at	= Year to year variation in the BTM common to the sample firms
ai	= Komponen dari BTM untuk perusahaan i
$Rt-j,i$	= Return on Equity (ROE) selama 6 tahun sebelum tahun t

Adapun beberapa komponen untuk menentukan tingkat Konservatisme akuntansi yang terdapat dalam rumus menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016) :

1. Pengertian Laba

Pengertian laba menurut Suwardjono (2014:464):

“Laba adalah kenaikan aset dalam suatu perioda akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula.”

Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Suwardjono (2014:455) berpendapat:

“Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintatik karena laba tidak didefinisikan secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba sehingga orang harus mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memakai laba. Jadi, laba merupakan hasil penerapan prosedur bukan sesuatu yang bermakna semantik.”

a. Konsep Laba

Konsep laba menurut Suwardjono (2014:458) dapat dijelaskan dalam tiga tingkatan, yaitu sintatik, semantik dan pragmatik.

Berikut penjelasan secara rinci konsep laba pada tingkatan tersebut:

1. “Konsep Laba pada Tingkat Semantik Pada tingkatan semantik digunakan tiga konsep ekonomi sebagai berikut:
 - a. Laba sebagai pengukur efisiensi Laba sebagai pengukur efisiensi mengandung makna bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk guna memungkinkan imbalan semaksimal mungkin bagi pemilik.
 - b. Laba Akuntansi dan laba ekonomi Laba akuntansi digunakan bukan sebagai pengganti laba ekonomi, tetapi sebagai penyedia informasi kepada pasar agar memungkinkan investor menghitung laba ekonomi.
 - c. Laba Banyak Orang Laba akuntansi digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian asumsi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Konsep Laba pada Tingkat Sintatik Pada tingkatan sintatik digunakan dua pendekatan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan transaksi dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan ini, pencatatan laba melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian kewajiban hanya bila ini merupakan hasil dari transaksi internal dan eksternal.
 - b. Pendekatan Kegiatan atau Aktivitas dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan aktivitas, laba diasumsikan timbul bila aktivitas- aktivitas atau kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil dari transaksi spesifik.
3. Konsep Laba pada Tingkat Pragmatik Konsep pragmatik laba berkaitan dengan proses keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga sekuritas dalam pasar yang teratur terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dan manajemen, dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan.
 - a. Laba sebagai Alat Peramal Laba sering digunakan untuk membantu mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba, meramalkan laba masa depan atau menetapkan risiko investasi dan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Laba akuntansi juga digunakan untuk mengambil keputusan manajerial.
 - b. Pendekatan Pasar Modal Pengamatan langsung dan tak langsung menyatakan bahwa laba per saham yang dilaporkan mempunyai dampak langsung pada harga pasar saham biasa dan dalam permintaan oleh masing-

masing investor, meskipun hipotesis pasar yang efisien menyiratkan bahwa perorangan tidak dapat memperoleh pengetahuan dari informasi ini. Akan tetapi, dalam bentuk Efficient market Hypothesis semikuat, penggunaan kandungan informasi dari laba merupakan dasar reaksi pasar terhadap informasi ini. Konsep laba yang digunakan oleh akuntan adalah laba akuntansi.”

b. Jenis-Jenis Laba

Laba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Zaki Baridwan (2004:34):

1. “Laba Kotor: selisih positif antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan (HPP). Laba ini belum dikurangi dengan biaya operasional dalam satu periode tertentu.
2. Laba Bersih Operasional: laba kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan dan semua biaya dalam kegiatan usaha.
3. Laba Bersih Sebelum Pajak: pendapatan perusahaan sebelum pajak, atau perolehan operasional dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lainnya.
4. Laba Bersih Setelah Pajak: laba yang diperoleh setelah ditambah atau dikurang dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak.”

2. Pengertian Laba Tahun Berjalan

Menurut Denny Putri Hapsari (2018) laba tahun berjalan adalah

“Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank atau usaha mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti”.

Menurut Suwardjono (2008:464) dalam Osin Tompodung (2014) Laba bersih Laba bersih (net income) adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal.

3. Pengertian Depresiasi

Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 adalah: “... alokasi sistematis jumlah yang dapat

disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

Sedangkan, menurut Rudianto (2012:260), mendefinisikan depresiasi atau penyusutan adalah: “... pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut”.

Berdasarkan pengertian depresiasi atau penyusutan di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa depresiasi atau penyusutan merupakan pengalokasian sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

4. Arus Kas Operasi

Menurut Prastowo (2011: 34), pengertian aktivitas operasi adalah

sebagai berikut:

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan (principal revenue producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan.”

Sedangkan Menurut Kieso et al (2011:205), aktivitas operasi

adalah sebagai berikut:

“Operating activities involve the cash effects of transaction that enter into the determination of net income, such as cash receipt from sales of goods and service and cash payments to suppliers and employees to obtain supplies and to pay expense”.

Dari beberapa pendapat mengenai aktivitas operasi, maka dapat

diinterpretasikan bahwa aktivitas operasi merupakan suatu

aktivitas yang mencerminkan kegiatan sehari-hari perusahaan

yang diharapkan dapat menciptakan suatu pendapatan, aktivitas

operasi juga berhubungan dengan item laporan laba rugi seperti

penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, royalti, komisi,

pendapatan lain serta pembayaran kas kepada pemasok barang,

karyawan, dan pemasok jasa lain.

- a. **Klasifikasi Laporan Arus Kas**
Menurut PSAK No.2 revisi (2014) bahwa dalam suatu arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas:

- 1) “Aktivitas Operasi: kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktiva lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan.
- 2) Aktivitas Investasi: Kas dari suatu kegiatan investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang.
- 3) Aktivitas Pendanaan: Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun komposisinya.”

- b. **Macam-Macam Laporan Arus Kas**
Menurut PSAK No.2 revisi (2014) menyatakan bahwa Laporan arus kas ada dua macam yaitu:

- a. “Cash inflow
Cash inflow adalah arus kas yang terdiri dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas terdiri atas:
- Hasil penjualan produk/jasa perusahaan.
 - Penagihan piutang dari penjualan kredit.
 - Penjualan aktiva tetap yang ada.
 - Penerimaan suatu investasi dari pemilik atau saham bila PT.
 - Pinjaman/hutang dari pihak lain.
 - Penerimaan sewa dan pendapatan lain.
- b. Cash outflow
Cash outflow ialah arus kas yang terjadi dari suatu kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar terdiri atas:
- Pengeluaran suatu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lainnya.
 - Pengeluaran suatu biaya administrasi umum dan administrasi penjualan.
 - Pembelian aktiva tetap.
 - Pembayaran utang perusahaan.
 - Pembayaran kembali investasi dari pemilik suatu perusahaan.

- Pembayaran pada sewa, pajak, dividen, bunga dan pengeluaran lain-lain.”

5. Total asset

Menurut Dwiki Erlangga Putra (2017) Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan beberapa metode pengukuran diatas, penulis menggunakan Earning/Accrual Measures model Givoly dan Hayn (2000) sebagai indikator dalam pengukuran Konservatisme. Earning/Accrual Measures model Givoly dan Hayn (2000) ini menggambarkan bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif.

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J. Adriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati

(2014:6):

“Pajak adalah kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 55 Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Sifatnya. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung. Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung. Pajak yang dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan caramelihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
 - 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
 - 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.
2. Menurut Sasaran/ Objeknya. Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya. Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.'

2.1.4.4 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan cara yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal maupun ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutangnya tanpa melanggar peraturan

perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swingly dan Sukartha,2015). Kelemahan peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap aturan yang ada sehingga dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan (Mangoting,1999).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137):

“Tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.”

Menurut Pohan (2013:10), penghindaran pajak adalah:

“...upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

2.1.4.5 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembiayaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.4.6 Karakteristik Penghindaran Pajak

Karakteristik *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) menurut

Organization For Economic Coperation and Development dalam Early Suandi (2016:8) adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement* yaitu dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya, padahal tidak ada. Hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan (loopholes) atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan selain tujuan dibuatnya undang-undang tersebut.
3. Terdapat unsur kerahasiaan dimana umumnya para konsultan pajak menunjukkan cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

2.1.4.7 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137-138), ada dua belas pengukuran penghindaran pajak pada tabel 2.1

Tabel 2. 1

Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{(\text{Worldwide cash tax paid})}{(\text{Worldwide total pre tax accounting income})}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>

<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{(Worldwide cash tax paid)}}{\text{(Worldwide total pre tax accounting income)}}$	<i>Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR -GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the Statutory ETR an firm's GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression : ETR differential Pre - tax book Income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from BTD/TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	<i>A measure of unexplaine d total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed a mount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>

<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:137-138)

Ada berbagai macam jenis pengurangan/penghindaran pajak yang telah diuraikan diatas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Cash Tax Paid = Pembayaran Pajak

Net Income Before Tax = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 (a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (< 25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 25% (≥ 25%), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut UU No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% ($< 22\%$) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

2.1.5 Nilai Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017:74), nilai perusahaan merupakan:

“... harga yang bersedia di bayarkan oleh para calon investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan maka dapat dipandang baik pula oleh para calon investor, sehingga calon investor akan berlomba-lomba dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan return yang di harapkan.”

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Tiwi Herninta (2019) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.

Menurut Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009), nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan *price to book value ratio*.

Harga yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar saham.

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Karena nilai nominal yang harus dikeluarkan investor untuk membeli nilai perusahaan dapat menilai kemakmuran pemegang nilai perusahaan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2012:86), Nilai Perusahaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. “Nilai perusahaan Unggulan Merupakan nilai perusahaan yang tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas nilai perusahaan atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik nilai perusahaan atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika nilai perusahaan tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta gantinya.
2. Nilai perusahaan Pertumbuhan (*Registered Stocks*) Merupakan nilai perusahaan yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Diatas sertifikat nilai perusahaan dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya.”

2.1.5.3 Karakteristik Nilai Perusahaan

Dalam Riski (2020), nilai perusahaan memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh nilai perusahaan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil nilai perusahaan menjadi lebih tidak pasti.
2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang nilai perusahaan, pemegang nilai perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan nilai perusahaannya (*one share one*

- vote*).
3. Memiliki hak terakhir (*junior*) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
 4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi nilai perusahaannya. Hak pemilikan nilai perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain.”

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusaan

Dalam Riski (2020), faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain:

1. “Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, karena pada perusahaan-perusahaan besar, pemilik saham pada dasarnya terpisah dari manajemen, sehingga kurang berdaya mengubah manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh negatif karena sekalipun perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar, namun modal yang digunakan juga besar, sehingga profitabilitasnya bisa jadi tidak terlalu tinggi disbanding perusahaan dengan ukuran lebih kecil.
2. Profitabilitas Sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga ROA meningkat, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.
3. Pertumbuhan laba sama halnya dengan pertumbuhan laba dan sejalan dengan peningkatan likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga *growth of earning after tax* meningkat, maka semakin baik kinerja perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.
4. Likuiditas Semakin tinggi likuiditas perusahaan (yang salah satunya tercermin dalam rasio kas atas aktiva lancar), semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat.
5. Inflasi Inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kondisi inflasi akan menurunkan daya beli perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan retensi dana lebih besar agar dapat terus membiayai aktivitasnya.”

2.1.5.5 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Fahmi (2017:138), ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran nilai perusahaan, diantaranya:

1. Earning per Share (EPS)

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rasio EPS digunakan untuk melihat tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Nasicha, 2018). Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Earning Per Share* (EPS) Menurut Tandelilin (2010: 374) dalam Nasicha (2018) yaitu:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Deviden}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2. Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan *earnings* (Riski, 2020). Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Price Earning Ratio* dalam Tresna (2020) yaitu:

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba Per Lembar Saham}}$$

3. Book Value per Share (BVPS)

Menurut Ima Andriyani (2016) Nilai Buku, adalah nilai asset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktivabersih untuk saham yang dimiliki investor. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku : Nilai nominal (*Par Value*), ialah nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel nilai perusahaan dengan *Book Value per Share (BVPS)* dalam Dewanto (2021) yaitu:

$$BVPS = \frac{\text{Aset} - \text{Hutang}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

4. Jumlah Saham Beredar

Bety Farandani (2016) Saham beredar adalah sejumlah saham yang dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan sebagai sarana investasi publik. Jumlah saham beredar adalah jumlah total saham perusahaan yang berada ditangan investor, dimana angka jumlah saham beredar tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan.

5. Tobins'Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Tobin's Q*. Rasio Tobin's q dikembangkan oleh profesor James Tobin (1967), rasio ini merupakan pengukuran kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. *Tobin's Q* adalah suatu gambaran statistik yang memiliki

fungsi sebagai pengukur dari nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang, terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan. Secara matematis *Tobin's q* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{\text{MVE} + \text{DEBT}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan:

$Q = \text{Tobin}'q$

MVE = Harga Saham

Debt = Total Hutang

6. *Price Book Value* (PBV)

Menurut Wiyono dan Kusuma (2017:74), nilai perusahaan merupakan:

“... harga yang bersedia di bayarkan oleh para calon investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan maka dapat dipandang baik pula oleh para calon investor, sehingga calon investor akan berlomba-lomba dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan return yang di harapkan.”

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Tiwi Herninta (2019) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar (*market ratio*) yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan (Ang, 1997 dalam Pratiwi 2018). Selain itu, *Price Book Value* merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli.

Menurut Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009), nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan *price to bookvalue ratio*. Harga yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar saham.

Menurut Bringham dan Ehrhardt (2002) dalam Amalia, Daniel (2017) Nilai perusahaan dapat diukur dengan rumus *Price Book Value* yaitu :

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Nilai buku saham dapat dihitung dari :

$$\text{Nilai Buku Saham} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Menurut Hidayati (2010) Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV nya mencapai di atas 1 (satu) yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari pada nilai bukunya.

2.1.5.6 Saham

Menurut Ahmad Ulil Albab Al Umar (2020) saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembor kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut , (Darmadji dan Fakhruddin, 2012 : 5). Menurut Fahmi (2012 : 86) pasar modal memiliki dua jenis saham yaitu :

- a) Saham biasa (*common stock*), surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nominal (rupiah, dollar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberikan hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham di akhir tahun memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.
- b) Saham istimewa (*preferred stock*), surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan).

2.1.5.7 Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan harga yang digunakan dalam melakukan transaksi pasar modal yang terbentuk dari mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar (Jogiyanto, 2008) dalam Bety Farandani (2018) .

Menurut Irene Oktavia dan Kevin Genjar (2019) harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. (Jogiyanto, 2008:167). Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham (Brigham & Houston, 2010:7).

Harga saham yang ada di pasar selalu berfluktuasi, atau selalu berubah. Beberapa penelitian mengaitkan harga saham dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham juga akan meningkat. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Biasanya perusahaan yang telah *Go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya minimal setiap tiga bulan sekali. Saat ada publikasi laporan keuangan para investor akan melihat kinerja laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jika laba perusahaan meningkat, investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut maka permintaan terhadap saham tersebut juga akan meningkat, sehingga harga saham akan naik. Hal ini berlaku sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian maka harga saham akan cenderung turun.

Menurut Juanda Astarani dan Noviyanti (2013) ketika saham dijual dengan harga dibawah nilai parinya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan diskonto (*disagio*). Sebaliknya, ketika saham dijual dengan harga di atas nilai

parinya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan premium (agio). Nilai agio dan disagio merupakan salah satu cerminan penilaian publik atas kondisi perusahaan yang menerbitkan saham.

Menurut Komarudin Ahmad (2004:35) menyatakan bahwa :

“Agio saham adalah selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dari pada nilai nominal.”

Sedangkan menurut Rusdi (2008:23) menyatakan bahwa :

“Agio saham merupakan selisih nilai jual saham diatas nilai nominal saham, dari selisih tersebut dicatat sebagai rekening agio saham.”

Dari pengertian diatas bahwa rekening (akun) agio saham dipakai untuk mencatat kelebihan harga dia atas nilai nominalnya sedang rekening disagio saham dipakai untuk mencatat kekurangan harga dari nilai nominal saham. Rekening-rekening agio atau disagio saham adalah rekening yang menunjukkan modal yang disetor dari pemegang saham, oleh karena itu selama saham-saham tersebut masih beredar maka rekening itu juga akan nampak dalam neraca. Di dalam neraca rekening agio saham merupakan tambahan terhadap rekening modal saham, dan rekening disagio saham merupakan pengurangan terhadap rekening modal saham. Apabila saham yang beredar ditarik, maka rekening agio dan disagio saham yang berhubungan dengan saham tersebut dibatalkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Konservatisme Akuntansi dan Penghindaran Pajak terhadap variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

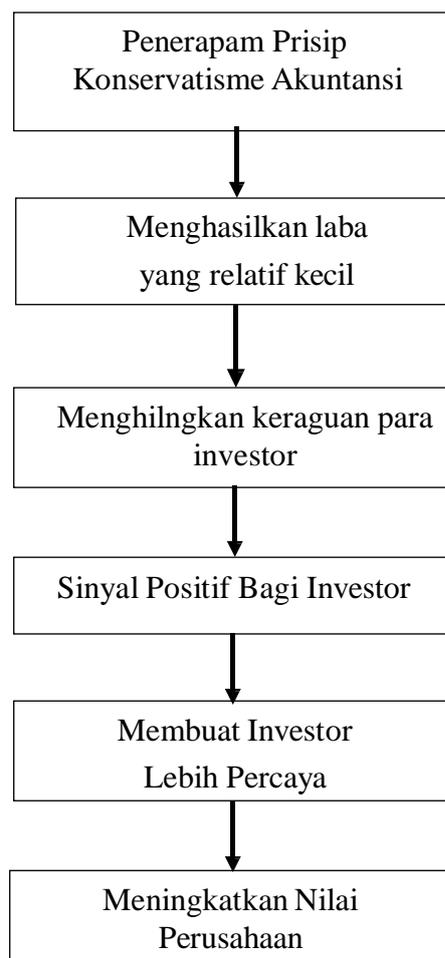
2.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan

Kezia Octavian dan Sugi Suhartono (2020), Prinsip kehati-hatian atau konservatisme dapat menurunkan konflik keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajemen karena tindakan oportunistik manajer yang hanya menguntungkan dirinya saja dapat dicegah. Konservatisme akuntansi berarti menerapkan verifikasi yang lebih tinggi dalam menyampaikan good news dibandingkan bad news bagi para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Penerapan prinsip akuntansi konservatif yang ditunjukkan melalui laporan keuangan dianggap sebagai suatu sinyal positif dari manajemen kepada investor bahwa manajemen telah bertindak konservatif untuk mencegah tindakan membesar-besarkan aset dan pendapatan perusahaan. Sinyal positif bagi investor dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham perusahaan di pasar modal.

Menurut Oktafia, Suharto & Gustin (2017) prudence merupakan konvergensi dari konservatisme akuntansi atau yang berarti prinsip kehati-hatian dalam mengakui pendapatan atau aktiva dan beban yang dapat berakibat mengecilkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan guna mengurangi resiko dari ketidakpastian dimasa depan. Dengan diterapkannya prudence oleh pihak manajemen akan menghasilkan laba yang relatif kecil yang juga merupakan suatu sinyal positif kepada investor, yang berarti bahwa mereka telah menerapkan prudence untuk mengurangi keraguan para investor. Dan hal ini akan membuat investor lebih percaya dengan laba yang diakui tidak *overstate*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puradinda Zulfiara dan Juli Ismanto (2019), Bambang Wibisono dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2019), Basuki dan Indra Gunawan (2019) serta Nugroho Rizkiadi dan Vinola Herawaty (2020). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kerangka pemikiran pengaruh konservatisme akuntansi terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi

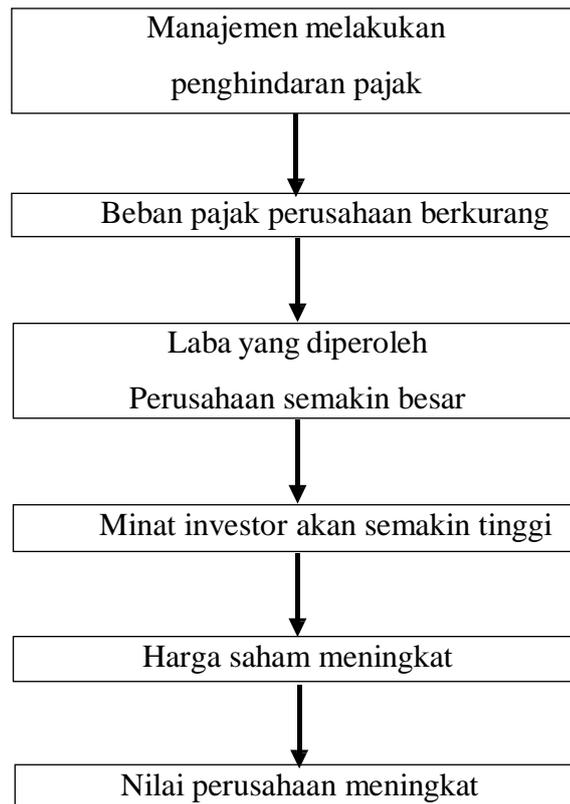
terhadap Nilai Perusahaan

2.2.2 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Enggar Adityamurti, dan Imam Ghozali (2017) mengatakan penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Variabel penghindaran pajak digunakan untuk mengukur bagaimana nilai perusahaan apabila terjadi pengurangan beban pajak pada perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puradinda Zulfiara dan Juli Ismanto (2019), Isnia Lailatul Amanah (2018), Andrian Novarianto dan Susi Dwimulyani (2019), serta Robby Krisyadi dan Evi Yessy Angery (2021). Dimana penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa

Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kerangka pemikiran pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2. 2

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Penghindaran Pajak
terhadap Nilai Perusahaan**

2.2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) dalam Pratiwi (2020), hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

Menurut Jonathan Sarwono (2017:13), hipotesis merupakan:

“... dugaan atau saran mengenai karakteristik atau sifat-sifat fakta yang dapat terjadi yang dianggap sebagai suatu permulaan dalam penyelidikan ilmiah.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₂ : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.